



## Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mewujudkan Warga Negara Baik dan Cerdas

Danang Prasetyo<sup>✉</sup>, Jeni Danurahman, Hendra Hermawan

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*  
Disubmit: Desember 2022  
Direvisi: Maret 2023  
Diterima: April 2023

*Keywords:*  
Civic Education;  
Good Citizens;  
Smart Citizens

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembentukan warga negara yang baik (*good citizen*) melalui penyelenggaraan mata kuliah PKn yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Kajian ini diharapkan mampu memberikan rumusan penyelenggaraan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang ideal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dan fokusnya adalah memperdalam pemahaman manajemen pendidikan kewarganegaraan dalam proses pencapaian warga negara yang baik dan cerdas (*smart and good citizens*) yang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKn merupakan ilmu yang perlu dipelajari untuk membentuk warga negara yang baik, cerdas, ideal, berbakat yang berdasarkan ideologi Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan membentuk warga negara yang baik yang meliputi tiga aspek yaitu civics knowledge, civics skills, civics disposition. Upaya pembentukan warga negara yang baik dan cerdas melalui pendidikan kewarganegaraan dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman terhadap pengetahuan yang menekankan pembentukan sikap kejujuran, integritas, disiplin, dan kerja keras guna menjadi bangsa yang berkarakter dan berdaya saing.

### Abstract

*This research aims to determine the process of forming a good citizen through the implementation of civics courses in accordance with Pancasila and the UUD NRI 1945. This study is expected to be able to provide a formulation for the implementation of an ideal civic education course. This research is a qualitative research, and the focus is to deepen the understanding of civic education management in the process of achieving smart and good citizens. The results showed that Civics is a science that needs to be studied to form good, smart, ideal, talented citizens based on the Pancasila ideology. Citizenship education has the goal of forming good citizens which includes three aspects, namely civics knowledge, civics skills, civics disposition. Efforts to form good and smart citizens through civic education can be carried out by providing an understanding of knowledge that emphasizes the formation of honesty, integrity, discipline and hard work in order to become a nation with character and competitiveness.*

© 2023 Universitas Negeri Semarang

<sup>✉</sup> Alamat korespondensi:  
Jln. A Yani, Ringroad Timur No. 52 Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta.  
E-mail: danangprasetyo@stipram.ac.id

## PENDAHULUAN

Pendidikan memegang peranan penting dalam mendidik generasi penerus. Melalui pendidikan, suatu negara akan memiliki ciri khas dan daya saing yang kuat dengan negara lain. Pendidikan juga akan membentuk masa depan negara dalam tindakan. Pendidikan merupakan senjata penting untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang handal, cerdas, cendekiawan, berakhlak mulia dan lain sebagainya, sedangkan guru merupakan ujung tombak dari pendidikan tersebut dalam rangka membentuk manusia-manusia yang dapat bersaing Menghadapi Revolusi Industri 4.0 dan globalisasi saat ini.

Pasal 1 (ayat 1) Bab 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan adalah upaya sadar dan terencana yang bertujuan untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran supaya peserta didik dapat secara aktif memainkan potensi dirinya, religius, kekuatan spiritual, pengendalian diri kepribadian, kebijaksanaan, akhlak mulia dan keterampilan yang dibutuhkan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, agama dan negara. Adapun dalam Pasal 1 (ayat 3) menjelaskan bahwa pendidikan nasional berpijak pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, budaya bangsa Indonesia dan menyesuaikan dengan perubahan zaman. Pasal 3 juga menjelaskan bahwa pendidikan nasional mempunyai fungsi untuk mengembangkan kemampuan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk bangsa dan peradaban bangsa yang bermartabat, serta bertujuan untuk menumbuhkembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Salah satu pendidikan yang wajib berdasarkan kukuikulum yang termuat dalam pasal 37 ayat (1) menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan/ pengetahuan yang harus dipelajari,

dipahami, kemudian dimanifestasikan oleh setiap peserta didik dari jangka pendidikan dasar, menerima pendidikan tinggi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, negara dan negara bagian. Dengan penjelasan tersebut sebenarnya telah menggambarkan representatif bahwa pendidikan kewarganegaraan sangat diperlukan dan menjadi urgensi di Indonesia.

Pendidikan kewarganegaraan (PKn) merupakan disiplin ilmu yang membimbing warga negara untuk memahami hak dan kewajiban negara dan warga negara yang tinggal di negaranya. Subjek penelitian kewarganegaraan menekankan pada nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan yang merupakan disiplin ilmu yang bertujuan membimbing warga negara untuk memahami hak dan kewajiban negara dan warga negara yang tinggal di negaranya. Tema penelitian kewarganegaraan menekankan pada nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan. Tujuan dasar pendidikan kewarganegaraan berpusat pada guru dan peserta didik dalam proses pengajaran yang sistematis. Ciri-ciri mata pelajaran PKn meliputi pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan dan karakter kewarganegaraan. Margaret S. Branson, (1999: 8) bahwa hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana yang bertujuan mencerdaskan warga negara dengan menumbuhkan moralitas dan jati diri moral, menumbuhkan karakter bangsa dan memberdayakan warga negara sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban di negara, negara, dan wilayah. Kelangsungan hidup dan kemuliaan bangsa dan bangsa.

Dalam menghadapi segala tantangan yang akan terjadi, setiap individu warga negara indonesia perlu dibekali dengan berbagai keterampilan termasuk keterampilan melek digital, adanya pengaruh globalisasi serta revolusi industri berdampak pada perubahan dalam berbagai sendi kehidupan. Menurut Ihsan (2017: 49) pada abad ke-21, warga suatu bangsa akan menghadapi berbagai perubahan dan ketidakpastian dalam berbagai aspek dengan perkembangan konstelasi kehidupan, termasuk pendidikan, kemasyarakatan, ekonomi, budaya,

politik, dll. Mengingat urgensinya hal tersebut maka perlu adanya persiapan dalam menghadapi hal tersebut terutama dalam hal mempersiapkan sumber daya manusia yang dapat bersaing, beradaptasi, serta berkontribusi mengikuti arus global.

Dalam situasi ini, pendidikan kewarganegaraan memiliki tanggung jawab untuk menumbuhkan warga negara yang baik (*good citizen*) dalam pengetahuan dan pemikiran dalam emosi dan tindakan. Pembentukan karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjadikan manusia menjadi warga negara yang demokratis yang bertanggung jawab atas pendidikan filsafat, sosial politik dan psikologi, yaitu pendidikan kewarganegaraan. Misi Pancasila dan Kewarganegaraan adalah menumbuhkan kemampuan warga negara yang baik (*good citizen*) agar dapat berperan aktif dan bertanggung jawab bagi kelangsungan pemerintahan yang demokratis melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan karakter sipil. Adapun visi pendidikan kewarganegaraan bertujuan mewujudkan masyarakat demokratis. Oleh karena itu penulis mengambil judul mengenai peran pendidikan kewarganegaraan dalam mewujudkan *good citizen*.

Penerapan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan memiliki sejarah yang panjang pada pemerintahan orde lama, orde baru, dan era reformasi. Pendidikan memiliki tujuan yang sama dalam membentuk warga negara yang baik (*good citizen*), yang meliputi tiga aspek yaitu pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan kewarganegaraan. Namun dalam membentuk warga negara yang baik, hal tersebut biasanya tidak terlepas dari kepentingan pemerintah yang sedang berkuasa, masalahnya warga negara yang baik adalah warga negara yang tunduk pada sistem pemerintahan. Inilah titik awal dari kepentingan politik rezim yang mencoba menggunakan metode pendidikan kewarganegaraan dengan mengambil warga negara sebagai mata pelajaran yang sesuai secara doktrinal, sehingga menggunakan kursus pendidikan

kewarganegaraan untuk memasukkan kepentingan politiknya (Mulyono, 2017: 221). Hal ini tentunya bukan perilaku yang terpuji. Idealnya kurikulum pendidikan harus ditempatkan, disusun dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan negaranya, agar tercipta negara yang mampu bersaing dalam skala global, daripada menciptakan negara yang bertaraf internasional. Jika ini masalahnya, maka generasi negara yang diperintah oleh rezim telah melakukannya. Menanggapi penjelasan tersebut, penulis memfokuskan skripsi tentang penyelenggaraan mata kuliah PKn dalam mewujudkan warga negara yang baik.

#### **METODE**

Dalam penelitian ini penjelasan kualitatif (Farisi, 2015: 130) menitikberatkan pada pemahaman atau pemahaman tentang penyelenggaraan PKn dalam proses mewujudkan warga negara yang baik (*good citizen*) sebagai badan utama. Data dalam artikel ini berupa teks dan teks narasi (kata, frasa, kalimat, dan paragraf), yang digunakan sebagai unit wacana pasti dan memiliki makna konstitutif. Kemudian, teknik "pengambilan sampel teks untuk pemilihan target" digunakan untuk mengumpulkan dan memilih data "teks" dari sumber primer dan sekunder. (Barbara M. Wildemuth, 2009: 319) menerapkan kursus pendidikan kewarganegaraan untuk mencapai warga negara yang baik.

Sumber utama penelitian adalah referensi, literatur, dan jurnal penelitian terpercaya yang memuat teks dan karya, termasuk penelitian mata kuliah PKn, dan melahirkan warga negara yang baik. Pada saat yang sama, sumber sekunder adalah teks tertulis dan karya ilmiah yang berkaitan dengan kursus pendidikan kewarganegaraan dan menciptakan warga negara yang baik. Berdasarkan tugas dan tinjauan pustaka sebelumnya, kedua sumber data ini dikumpulkan dengan menggunakan teknologi anotasi bibliografi, yang berisi karya akademis tentang masalah, gagasan bermasalah, dan gagasan tentang penyelenggaraan mata

kuliah PKn dalam mewujudkan warga negara yang baik (*good citizen*).

Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis konten secara kualitatif (Kalekin-Fishman, 2001). Teknik analisisnya menekankan pada interpretasi subjektif penulis terhadap isi, isi, dan teks dengan mengungkapkan makna yang terkandung dalam penelitian tentang penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan dengan menyusun serta mengidentifikasi teori dan model tertentu.

## PEMBAHASAN

### Konsep Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan

Mata pelajaran pendidikan memang mengalami pergantian nama yang sangat cepat karena mata pelajaran tersebut rawan terhadap perubahan politik, namun ironisnya nama tersebut sudah berkali-kali diganti, namun secara umum dan cara penerbitannya kebanyakan tidak akan berubah. Misalnya dari segi konten, muatan pendidikan kewarganegaraan lebih menekankan pada memori pengetahuan, daripada materi pembelajaran, yang mendorong peserta didik untuk berpikir terutama pada tataran berpikir kritis. Dari sudut pandang metodologis, metode politik dan kekuasaan ditekankan. Kemudian dari segi sistem pembelajaran dalam pembelajaran atau penyampaian lebih menekankan pada pembelajaran satu arah dan posisi dominan guru. Posisi dominan ini lebih menonjol, sehingga hasilnya dapat diprediksi yaitu ekspresi lisan yang secara umum dianggap Erat. terkait dengan pendidikan umum. Pendidikan di Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, pendidikan kewarganegaraan perlu diubah.

Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik sebagai berikut: 1). Secara kritis, nasional dan kreatif memikirkan tentang masalah kewarganegaraan. 2). Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak bijak dalam acara komunitas, nasional, dan kenegaraan. 3). Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia agar dapat

hidup bersama negara lain. 4). Memanfaatkan perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi untuk berinteraksi langsung atau tidak langsung dengan negara lain di dunia.

Pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya merupakan program pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, sebagai alat untuk mengembangkan dan memelihara luhur dan nilai-nilai moral yang berakar pada budaya bangsa, diharapkan menjadi identitas yang terwujud dalam wujud perilaku di masyarakat. negara dan kehidupan sehari-hari negara. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang menitikberatkan pada agama, sosial budaya, bahasa, usia, ras, menjadi warga negara yang baik (*good citizen*), pembinaan diri kebhinekaan etnis yang cerdas dan terampil, serta bercirikan Pancasila dan UUD 1945.

Secara epistemologis, dalam proses pengembangan pendidikan kewarganegaraan demokratis di seluruh dunia, perlu dipahami dan dijelaskan pendidikan kewarganegaraan dalam konteks konsep kewarganegaraan/ pendidikan kewarganegaraan. Dapat dijelaskan bahwa pendidikan (*educare = educare*) adalah usaha manusia, yang menyadari tujuan sebagai berikut: mengembangkan potensi diri, menjadi anggota masyarakat, putra bangsa, dan warga negara yang dewasa, baik hati, berbakat, dan cakap. Oleh karena itu, pendidikan, termasuk pendidikan kewarganegaraan, merupakan sarana pendidikan dan sosial budaya yang dipandang sebagai bagian integral dari peradaban manusia dan telah memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat, negara, dan kehidupan berbangsa (Winataputra, 2014: 2).

Catatan sejarahnya, pendidikan kewarganegaraan telah mengalami perubahan nama kursus pendidikan di Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan pada masa orde lama diberi nama PKn (1962), dengan tujuan untuk membentuk karakter warga negara "sosialis moral Indonesia". Pada masa orde baru, pendidikan kewarganegaraan mengalami nasib yang sama. Meskipun memiliki nomenklatur yang beragam, mulai dari

Pendidikan Kewarganegaraan (1968), kemudian diubah menjadi PMP (1975 dan 1984) pada masa Orde Baru, dan PPKn (1994), Pendidikan Kewarganegaraan berperan aktif dalam menerjemahkan nilai-nilai budaya baru. Ketertiban, Terbentuk “Pembangunan Manusia adalah Pancasila”. Pancasila merupakan nilai inti pendidikan kewarganegaraan era orde baru, dan juga direduksi menjadi 36 poin dalam P4. Pendidikan kewarganegaraan pada masa reformasi memiliki paradigma baru. Dengan mengimplementasikan nama PKN pada mata kuliah 2004 dan 2006, serta mengimplementasikan nama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada mata kuliah 2013, diharapkan dapat terbentuk warga negara yang “kritis, demokratis dan partisipatif” (Mulyono, 2017: 221).

Membahas mengenai Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia, tentu tak lengkap apabila tidak membahas mengenai Pancasila. Karena menurut (Gustilianto, 2017: 338) dijelaskannya, pendidikan kewarganegaraan merupakan upaya preventif untuk mempertahankan dan melaksanakan Pancasila, yaitu melalui upaya pendidikan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, apresiasi, pengetahuan dan praktik, peningkatan kesadaran nasional, peningkatan kesadaran pulau, dan tindakan preventif lainnya. Lebih lanjut Gustilianto menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan upaya pencegahan dan pemeliharaan Pancasila, yaitu melalui upaya pendidikan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, apresiasi, pengetahuan dan praktik, peningkatan kesadaran nasional, peningkatan kesadaran pulau, dan tindakan preventif lainnya. Hal tersebut sejalan dengan (Oluniyi, 2011: 61) mengemukakan kondisi Pendidikan Kewarganegaraan di negara Nigeria, Pendidikan Kewarganegaraan di negara Nigeria berperan untuk membentuk warga negara yang nasionalis, upaya tersebut dilakukan agar tidak adanya konflik antar etnis, karena di negara Nigeria merupakan suatu negara dengan kondisi rawan konflik, terutama konflik antar etnis seperti diskriminasi, rasisme, dan lain sebagainya. Maka Pendidikan

Kewarganegaraan merupakan sebuah solusi di negara Nigeria untuk menciptakan suatu kondisi masyarakat yang damai, menerima, menghargai, dan menghormati segala bentuk perbedaan. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan kondisi Pendidikan Kewarganegaraan di Israel Pinson, (2007: 331) menjelaskan bahwa di Negara Israel, tujuan kursus pendidikan dan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan warga negara yang mengarah pada nilai-nilai universalis dan partikularis.

Berbeda dengan kajian Oonk, (2014: 13) yang menjelaskan kondisi pendidikan kewarganegaraan di negara Belanda, pasca krisis yang terjadi di negara Belanda, berakibat pada timbulnya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat merasa kecewa. Maka dari itu pemerintah berupaya untuk mengembalikan rasa percaya dan dukungan masyarakat dengan cara meningkatkan mutu kurikulum pendidikan kewarganegaraan dengan tujuan agar masyarakat dapat ikut berperan aktif, berkontribusi, dan juga berpartisipasi aktif dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang terjadi di negara Belanda.

### **Pembentukan Warga Negara yang Baik**

Pendidikan kewarganegaraan merupakan sarana yang efektif dalam proses pembentukan warga negara yang baik, secara sederhana dapat diartikan sebagai warga negara yang baik yang memahami hak dan kewajibannya dalam menghadapi negara lain dalam kehidupan suatu negara (sebagai negara). Menurut Aulia (2016: 67) berpendapat bahwa Pendidikan kewarganegaraan merupakan sarana yang efektif dalam proses pembentukan warga negara yang baik, secara sederhana dapat diartikan sebagai warga negara yang baik yang memahami hak dan kewajiban suatu negara (sebagai negara) menghadapi negara lain dalam kehidupannya.

Terdapat lima syarat warga negara dapat dikatakan warga negara yang baik yaitu sebagai berikut. *Pertama*, yaitu kemampuan warga negara dalam mengelaborasi pemahaman tentang demokrasi dan keberagaman. *Kedua*,

Mengenai kapasitas warga negara untuk berpartisipasi secara demokratis. *Ketiga*, Hubungan yang aktif dengan sesama warga negara. *Keempat*, keinginan warga negara untuk melakukan reformasi atau perubahan, lalu yang *Kelima* yaitu mengenai kemampuan dan kemauan seseorang atau warga negara untuk melakukan dialog. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa perlu adanya persiapan, pemahaman dalam upaya pembentukan warga negara baik (*good citizen*).

Sedangkan Suyato et al., (2016: 148) mengungkapkan ada 5 (lima) sikap yang perlu dikembangkan dalam upaya membentuk warga negara yang baik. Lima sikap tersebut yaitu meliputi sikap peduli, bertanggung jawab, mandiri, demokratis, kritis, dan sederhana. Dalam upaya pembentukan warga negara yang baik perlu dipahami bahwa warga negara yang baik berbeda dengan manusia baik, istilah warga negara yang baik berbeda dengan manusia yang baik. Istilah warga negara selalu identik dengan hubungan individu dengan negara, maka dari itu sepanjang warga negara memiliki sikap dan perilaku yang tidak bertentangan dan mematuhi konstitusi maka ia dapat dikategorikan sebagai warga negara yang baik, sedangkan manusia baik pada dasarnya sama di semua negara. Karena manusia baik ditentukan oleh hati nuraninya sendiri.

Upaya pembentukan warga negara yang baik dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman, pengetahuan yang menekankan sikap kejujuran, integritas, disiplin, dan kerja keras. Hal tersebut sangat relevan dalam kehidupan bermasyarakat, sikap-sikap seperti itu memang harus ditanamkan pada setiap individu warga negara. Seperti contoh misalnya membuang sampah pada tempatnya, mengambil sampah yang berserakan di tempat umum, ikut berkontribusi dalam program donor darah, mematuhi hukum dan lain sebagainya. Program seperti inilah yang harus di terapkan di Indonesia, sehingga warga negara Indonesia dapat berkontribusi dan memosisikan diri serta bertanggung jawab sebagai individu warga di suatu negara. Selain itu menekankan pada nilai karakter setiap individu seperti memperlakukan

orang lain dengan hormat, menyelesaikan masalah secara damai, serta memperhatikan perasaan orang lain. Nilai-nilai seperti itulah yang harus di terapkan pada setiap individu warga negara dan dapat di realisasikan dalam kehidupan nyata dalam ruang lingkup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut Chotimah (2017: 225) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah salah satu mata pelajaran wajib mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Visinya adalah cara untuk pembentukan karakter (pembangunan kebangsaan dan pembangunan karakter) dan misinya adalah menjadikan warga negara yang baik dan cerdas (warga negara yang cerdas dan baik). Meskipun dalam perjalanannya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan banyak menghadapi tantangan dan hambatan dan diubah beberapa kali, ini membuat Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semakin menguat. Maka penting untuk merevitalisasi peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan memosisikan ulang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ke dalam koridor di berbagai peran, tidak hanya sebagai peran kurikuler tetapi juga sebagai program ekstrakurikuler, sosial budaya, serta kebangsaan program politik tetapi tidak dikemas secara indoktrinasi.

Dikdik Baehaqi Arif (2014: 1) mengungkapkan bahwa warga negara yang ideal yaitu warga negara yang memiliki karakter demokratis dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam hal ini dapat meliputi tanggung jawab warga negara terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab terhadap lingkungan, serta tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Tanggung jawab dalam hal ini dapat diartikan sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu perwujudan dari hak maupun kewajiban. Penjelasan tersebut sejalan dengan pendapat Pinet, (2006: 2) mengemukakan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu situs kontestasi dengan menganalisis proses pembuatan kurikulum melalui tiga tahap yaitu:

1). Tahap produksi, 2) Tahap penerimaan, 3). Tahap implementasi. Dengan menganalisis tiga proses tersebut diharapkan dapat menemukan formulasi terbaik pada penerapan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan, sehingga dapat bermanfaat dan memiliki signifikan dalam upaya membentuk karakter warga negara yang baik, yang sesuai dengan kebutuhan masa kini, yang dapat cepat tanggap menyesuaikan dengan lingkungan.

Penelitian pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk warga negara yang baik selalu menimbulkan kompleksitas. Sumardjoko (2013: 111) beberapa faktor yang dikemukakan, faktor-faktor tersebut mempersulit upaya pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk warga negara yang baik. Pertama, pendidikan kewarganegaraan selalu bersinggungan dengan kepentingan politik negara, sehingga dengan mudah dapat digunakan sebagai sarana untuk membela hak-hak politik. rezim. Kedua, konsep kewarganegaraan terkait dengan atribut warga negara yang "baik", dan juga mengandaikan bidang penelitian tentang etika kebangsaan (filsafat moral). Ketiga, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya mengajarkan warga negara tentang hak dan kewajiban negara (*good citizen*), tetapi juga membangun warga negara yang aktif.

Selain itu, keberadaan pendidikan kewarganegaraan juga dapat menumbuhkan warga negara yang baik, tetapi Pendidikan Kewarganegaraan juga berperan menjadi sebuah solusi dalam memecahkan suatu persoalan, seperti halnya penjabaran kondisi di negara Belanda. Negara belanda pernah mendapat ancaman teroris pada waktu itu akibat banyaknya imigran muslim yang masuk ke negara Belanda selama 50 tahun lebih. Dengan adanya peristiwa teroris tersebut berdampak pada tatanan kehidupan sosial di negara belanda, yakni banyak masyarakat yang mengucilkan warga negara Belanda yang beragama Islam diasingkan karena masyarakat beranggapan bahwa mereka (yang memeluk agama Islam) merupakan sebuah ancaman, yang dapat menyerang kapan saja dan dimana saja. Pemerintah dalam hal ini berupaya untuk

menormalkan kembali tatanan kehidupan sosial dari akibat adanya peristiwa tersebut, salah satu upayanya yaitu dengan mengubah orientasi kurikulum dan pendidikan kewarganegaraan. Sehingga peserta didik memahami nilai-nilai demokrasi, multikultural, pluralisme agar peserta didik memiliki pemahaman bahwa non muslim ataupun muslim selama ia warga negara Belanda, ia memiliki hak dan tanggung jawab yang sama sebagai warga negara (Doppen, 2007: 103).

Westheimer & Kahne (2004: 223) membuat sebuah program politik kewarganegaraan partisipatif yang berorientasi untuk membuat suatu gerakan partisipasi sipil dengan visi kewarganegaraan partisipatif, dengan merefleksikan antara teori yang di terima di bidang akademik dengan realita yang terjadi masyarakat seperti pada pelayanan publik dan lain sebagainya. Titik fokus dalam program ini yaitu untuk membina pemahaman warga negara yang berorientasi pada keadilan serta di kaji dan di analisis secara struktural sampai pada akar masalah. Dengan mengkaji dan menganalisa isu-isu kontroversial, kemudian secara langsung melakukan wawancara lapangan dan pengambilan data, peserta didik atau warga dapat dirangsang untuk berpikir kritis saat mengevaluasi permasalahan yang muncul. Hal tersebut sejalan dengan pendapat McGinnis (2015: 66) yang mengungkapkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah konstruksi yang kompleks dan multidimensi, dalam tulisan ini, penulis ingin menekankan bahwa perlu disusun suatu rencana khusus dan sejalan dengan kurikulum guna membentuk warga negara yang baik, sehingga warga negara dapat berperan aktif dalam setiap aktivitas masyarakat, negara dan negara.

## SIMPULAN

Pendidikan memegang peranan penting dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa. Melalui pendidikan suatu bangsa akan memiliki karakter dan memiliki daya saing yang kuat dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Adapun dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pendidikan Kewarganegaraan dalam hal ini memiliki tugas untuk membentuk warga negara yang baik baik secara pengetahuan dan pemikiran, baik secara emosional maupun baik secara tindakan. Dalam rentang sejarah pada penerapan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di masa pemerintahan Orde lama, Orde Baru, maupun masa Reformasi. Pendidikan memiliki tujuan yang sama dalam membentuk warga negara yang baik yang meliputi tiga aspek yaitu civics knowledge, civics skills, civics disposition. Ada lima syarat dan lima sikap warga negara dapat dikatakan warga negara yang baik. Upaya pembentukan warga negara yang baik dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman, pengetahuan yang menekankan sikap kejujuran, integritas, disiplin, dan kerja keras. Seperti contoh misalnya membuang sampah pada tempatnya, mengambil sampah yang berserakan di tempat umum, ikut berkontribusi dalam program donor darah, mematuhi hukum dan lain sebagainya. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah salah satu mata pelajaran wajib mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, S. S. 2016. Pembentukan wawasan global mahasiswa dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di FKIP Universitas Ahmad Dahlan. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 13(1). <https://doi.org/10.21831/civics.v13i1.11077>
- Barbara M. Wildemuth. 2009. Applications of Social Research Methods to Questions in Information and Library Science. *Handbook of Pragmatics*, 1–16. <https://doi.org/10.1075/hop.11.thi1>
- Chotimah, U. 2017. *Revitalizing the Role of Pancasila and Civics Education as Part of Nationality Development and Character Building in Indonesia*. 225–229. <https://doi.org/10.2991/ice-17.2018.50>
- Dikdik Baehaqi Arif, D. 2014. *Pendidikan Kewarganegaraan dan Pembentukan Karakter Demokratis Warga Negara*.
- Doppen, F. H. 2007. Now what? Rethinking civic education in the Netherlands. *Education, Citizenship and Social Justice*, 2(2), 103–118. <https://doi.org/10.1177/1746197907077043>
- Farisi, M. 2015. *Pendidikan Ips Sebagai “Synthetic Discipline” : Kajian Epistemologis Atas Pemikiran Nu'man Somantri*. 128–139.
- Gustilianto, G. 2017. *Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Upaya Membangun Warga Negara yang Baik*.
- Ihsan. 2017. Kecenderungan Global Dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di Sekolah. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(2), 49–58. <https://doi.org/10.24269/v2.n2.2017.49-58>
- Kalekin-Fishman, D. 2001. Review: David Silverman 2001. Interpreting Qualitative Data: Methods for Analysing Talk, Text and Interaction. *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, 2(3). <https://doi.org/10.17169/fqs-2.3.923>
- Margaret S. Branson, D. 1999. *Seri Pendidikan Politik Belajar 'Givic Education' dari Amerika* (Issue November).
- Mcginnis, T. A. 2015. “A Good Citizen is What You’ll Be”: Educating Khmer Youth for Citizenship in a United States Migrant Education Program. *Journal of Social Science Education ©JSSE*, 14(3), 66–74. <https://doi.org/10.2390/jsse-v14-i3-1399>
- Mulyono, B. 2017. Reorientasi civic disposition dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya membentuk warga negara yang ideal. In *Jurnal Civics* (Vol. 14).
- Oluniyi, O. 2011. Country Report: Citizenship Education and Curriculum Development in



- Nigeria. *Journal of Social Science Education* © JSSE, 10, 61–67. <https://www.jsse.org/index.php/jsse/article/view/578>
- Oonk, H. 2014. The european cooperation is facing new challenges - Some impact on citizenship education in the Netherlands. *Journal of Social Science Education*, 13(3), 73–82. <https://doi.org/10.2390/jsse-v13-i3-1311>
- Pinet, R. 2006. The Contestation of Citizenship Education at Three Stages of the LINC 4 & 5 Curriculum Guidelines: Production, Reception, and Implementation. *TESL Canada Journal*, 24(1), 1. <https://doi.org/10.18806/tesl.v24i1.25>
- Pinson, H. 2007. At the boundaries of citizenship: Palestinian Israeli citizens and the civic education curriculum. *Oxford Review of Education*, 33(3), 331–348. <https://doi.org/10.1080/03054980701366256>
- Sumardjoko, B. 2013. *Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Pembelajaran PKN Berbasis Kearifan Lokal untuk Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa*. lppmums. <http://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/4291>
- Suyato, S., Murdiono, M., Mulyono, B., & Arpanudin, I. 2016. Upaya pembentukan warga negara yang baik dan tantangan yang dihadapi oleh para guru PKN peserta SM3T 2015. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 13(2), 137–150. <https://doi.org/10.21831/civics.v13i2.12737>
- Westheimer, J., & Kahne, J. 2004. What kind of citizen? The politics of educating for democracy. *American Educational Research Journal*, 41(2), 237–269. <https://doi.org/10.3102/00028312041002237>
- Winataputra, U. S. 2014. *Diskursus Aktual Tentang Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) Dalam Konteks Kurikulum 2013*.